

BAB I

PENDAHULUAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

A. Latar Belakang

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa pengangguran dan kemiskinan bagaikan dua permasalahan yang selalu bergandengan. Pengangguran yang tinggi mencerminkan rendahnya kualitas pendidikan, dan bukan tidak mungkin pengangguran yang semakin hari kian meningkat jumlahnya dapat membawa bangsa Indonesia berada pada posisi yang sulit dalam menghadapi era globalisasi.

Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Diklusepa) Fasli Jalal dalam (Warta plus, 2004) mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada masalah pengangguran terdidik yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu persoalan keterampilan dan sikap mental mereka yang cenderung ingin menjadi pegawai ketimbang wiraswastawan. Sementara keterampilan yang mereka miliki dari persekolahan belum memadai sebagai calon pegawai ataupun calon wirausahawan.

Meningkatnya angka pengangguran dapat dilihat jika pada tahun 2001, jumlah orang muda yang menganggur sebanyak 6,1 juta orang maka tahun 2002 meningkat menjadi 8,6 juta orang. Tahun 2003, tercatat pengangguran sudah mencapai 10,3 juta jiwa (Tempo Interaktif, 2003). Bahkan tahun 2004 pengangguran di Indonesia sekitar 40 juta orang, dan jauh melebihi ketentuan ILO (ukuran pengangguran dunia yang diizinkan = max 1 % (persen) dari jumlah penduduk) (Kompas, 2004). Dan jumlah penduduk miskin tercatat 44,3 juta orang (BPS: 2000).

Pengangguran terjadi akibat dari banyaknya faktor penyebab, diantaranya adalah faktor penyebab ekonomi maupun penyebab sosial. Guy Standing dalam Wahyudi (1994) menyatakan bahwa penyebab pengangguran adalah perubahan struktur industri, ketidakcocokan keterampilan, ketidakcocokan geografis, pergeseran demografis, kekakuan institusi, tidak bisa dipekerjakan dan restrukturisasi kapital.

Ketidakcocokan keterampilan sebagai salah satu dari tujuh penyebab terjadinya pengangguran itu berkaitan dengan masalah pendidikan. Ketidakcocokan keterampilan yang utama disebabkan oleh kelambanan penyesuaian program-program pendidikan, sehingga antisipasi pendidikan terhadap kebutuhan nyata (*real need*) lingkungannya meleset, oleh Blaug disebut *vocational fallacy* (Warta plus, 2004).

Sejak terjadi krisis di Indonesia, bukan hanya angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, tetapi juga angka putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Data BPS 2003 menunjukkan bahwa angka putus sekolah itu meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak lagi bersekolah di Indonesia seluruhnya berjumlah 1,49 % dari total jumlah penduduk (Warta plus, 2004).

Kondisi tersebut memperkuat penelitian Oscar Lewis dalam (Philip. H. Comb, 1980) yang bekerjasama dengan Dewan Internasional untuk pengembangan Pendidikan (ICED) atas bantuan bank dunia melakukan penelitian pada negara berkembang. Hasil penelitiannya adalah bahwa negara berkembang umumnya mempunyai masalah jumlah penduduk yang tinggi, pendapatan

perkapita yang rendah, rata-rata 40 persen penduduknya adalah miskin, dan adanya pengangguran serta rendahnya tingkat pendidikan.

Comb (1980) dalam Tampubolon (2002) mengatakan untuk mengatasi kemiskinan pada negara berkembang dipandang perlu mengadakan program pembangunan pendidikan yang berorientasi pada masyarakat miskin melalui pendidikan, baik pendidikan formal, informal, dan nonformal terutama bagi petani, nelayan, pedagang kecil, buruh pabrik dan pengrajin guna meningkatkan produktivitasnya .

Menurut Suryadi dan Tilaar (1993) menyatakan bahwa hingga saat ini program pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja (*supply and demand*). Suplai terutama berkaitan erat dengan kemampuan penyediaan tenaga oleh lembaga pendidikan, sedangkan demand berkaitan dengan besarnya kebutuhan atau permintaan tenaga yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan melalui program-program tertentu (Idochi, 2003).

Tidak dapat dipungkiri adanya kecenderungan lulusan suatu jenis/jenjang pendidikan tidak memiliki keterampilan dasar sesuai dengan keterampilan yang seharusnya menjadi kewajiban jenis/jenjang pendidikan memberikannya. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka muncul kebijakan penerapan konsep *life skills* disemua satuan, jenis, dan jenjang pendidikan dengan harapan para tamatan pendidikan tersebut dapat menguasai keterampilan dasar minimal sesuai standar kewenangannya, tanpa terkecuali pada pendidikan luar sekolah (PLS).

Keberadaan PLS menurut teori Human capital yang menyatakan bahwa PLS mempunyai kontribusi dalam mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) terlatih, berdisiplin, memiliki sikap inovatif berwirausaha, mengembangkan diri,

serta mampu merintis dan mengembangkan kegiatan diberbagai sektor ekonomi di lingkungan kehidupannya.

Sesuai dengan tujuan PLS yang hendak dicapai di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 73 Tahun 1991 adalah (1) "melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu hidupnya, (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukau untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menyelenggarakan kegiatan melalui Kelompok Belajar (Kejar) seperti: Kejar Paket A setara SD, kejar Paket B setara SLTP, Kejar Paket C setara SMU, Keaksaraan Fungsional, Kelompok Belajar Usaha, Magang/Kursus keterampilan vokasional, KBO, Kelompok Bermain (PADU) dan sebagainya.

Dalam rangka pemberdayaan SDM pasca krisis, seperti upaya untuk mengatasi banyaknya angka putus sekolah (*drop out*), kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan suasana yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan memberikan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan dimasyarakat yaitu menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) khususnya kecakapan vokasional. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi warga belajarnya sehingga mereka mampu mandiri

Maka dilihat dari program-program yang diselenggarakan, SKB memiliki tujuan yang sangat strategis dalam rangka ikut memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan dewasa ini. Sekalipun upaya untuk mewujudkannya telah dan sedang dilakukan, namun harus diakui bahwa hasilnya masih belum dapat memenuhi harapan semua pihak.

Sebagaimana yang dialami SKB pada umumnya, SKB Petumbukan sebagai Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) kabupaten Deli Serdang juga melakukan terobosan kearah itu, namun belum memberikan hasil yang diharapkan.

Sebagai salah satu lembaga PLS, SKB Petumbukan telah empat kali menerima dana untuk penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup yang bersumber dari Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Dana tersebut telah dikucurkan sejak tahun 2002 hingga penelitian ini dilaksanakan telah meluluskan 80 orang warga belajar yang berasal dari masyarakat sekitar dengan jenis keterampilan vokasional yang berbeda seperti : keterampilan sulaman bordir, keterampilan membuat mebel, keterampilan membuat kusen, keterampilan las listrik , keterampilan salon dan keterampilan menjahit pakaian.

Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa lulusan program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan SKB Petumbukan masih belum memenuhi harapan dalam menanggulangi angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Sekalipun diantara lulusannya sudah ada yang membuka usaha sendiri. Namun secara umum masih dikategorikan belum berhasil dalam memandirikan lulusannya.

Sucipto (1991) menyatakan: bahwa kualitas keluaran suatu sekolah tergantung kepada kualitas manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah. Maka peran kepala SKB sebagai manajer sangat dituntut dalam menentukan kualitas lulusannya.

Fenomena yang terjadi di SKB Petumbuhan bahwa kepala SKB telah bekerja semaksimal mungkin, menggunakan kemampuannya dalam memberdayakan tenaga pamong belajar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Menjalin kerjasama lintas sektoral, maupun kerjasama dengan masyarakat, agar dapat melibatkan mereka untuk dapat mewujudkan tujuan SKB.

Namun kenyataanya sangat sulit untuk mewujudkan visi dan misi SKB terutama dalam program pendidikan kecakapan hidup. Bila masalah yang diuraikan diatas dibiarkan dan tidak diadakan perbaikan atau tindak lanjut, maka akan timbul kekhawatiran bahwa:

1. implementasi manajemen di SKB Petumbuhan tidak akan optimal
2. upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah tidak akan terlaksana.
3. tujuan penyelenggaraan program kecakapan hidup dalam memandirikan warga belajarnya tidak akan tercapai.
4. upaya untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan tidak akan terlaksana.
5. SKB akan tetap menjadi bagian pendidikan luar sekolah yang tidak dikenal dikalangan masyarakat

Sebagai salah satu lembaga PLS maka SKB Petumbuhan sesuai dengan visi dan misinya dalam menjalankan program tidak terlepas dari manajemen yang diterapkan untuk mengoptimalkan tujuan pembelajaran, memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada agar diperoleh lulusan sesuai dengan harapan.

Belum berhasilnya program tersebut dalam memandirikan lulusannya diasumsikan karena penataan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang diterapkan belum tepat pada kondisi SKB yang masih memiliki sumber daya yang terbatas baik tenaga kependidikan dan non-kependidikan maupun sarana dan prasarana yang dimiliki.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah : “Bagaimana strategi manajemen program kecakapan hidup dalam memandirikan warga belajar di SKB Petumbuhan.

Untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian, rumusan masalah tersebut difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program pendidikan kecakapan hidup
2. Bagaimana pengorganisasian program pendidikan kecakapan hidup.
3. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup
4. Bagaimana pengawasan program pendidikan kecakapan hidup

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang konkrit mengenai strategi manajemen program kecakapan hidup dalam

memandirikan warga belajarnya di SKB Petumbuhan. Kemudian secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Perencanaan program pendidikan kecakapan hidup.
2. Pengorganisasian program pendidikan kecakapan hidup.
3. Pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup.
4. Pengawasan program pendidikan kecakapan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan strategi manajemen program kecakapan hidup dalam memandirikan warga belajar. Disamping itu, diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pendidikan pada umumnya dan ilmu manajemen pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah (PLS).

Secara praktis hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi:

1. SKB sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam penyelenggaraan program PLS khususnya pendidikan kecakapan hidup dalam memandirikan warga belajar.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan program kecakapan hidup khususnya kecakapan vokasional pada jalur PLS.
3. Pihak pengelola pendidikan di kabupaten Deli Serdang sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan strategi manajemen program kecakapan hidup dalam memandirikan warga belajar.

E. Batasan Istilah

- a. **Strategi Manajemen** dalam pengelolaan program kecakapan hidup adalah bagaimana menciptakan suasana yang baik secara produktif dalam institusi pendidikan (SKB) diukur dari keefektifan dan keefisienan pencapaian tujuan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.
- b. **Program Kecakapan Hidup** adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam menginteraksikan berbagai pengetahuan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri.
- c. **Kemandirian Warga Belajar** adalah kemampuan/kecakapan tertentu warga belajar sesuai dengan bidangnya agar dapat bekerja pada suatu unit usaha atau membuka usaha sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya setelah mengikuti pelatihan.
- d. **Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)** adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota, merupakan bagian dari PLS.